ISSN:2622-5522 (p); 2622-5530 (e)
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi,
DOI: http://dx.doi.org/ 10.24042/jw.v6i1.16545

Jaringan Ekonomi DI/TII di Mamuju 1953-1965

Aco Fikram S*
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Aco_f@yahoo.com

Syamsul Syamsul
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Mamuju
Syamsul.mmj82@gmail.com

Abstract

The subject matter of this research is the DI/TII economic network in Mamuju, 1953-1965. The data processing method uses the historical method; heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The source of the data is in the form of interviews with perpetrator informants and historical witnesses (oral sources), as well as relevant archives, documents and books (written sources). The results of this study found that Mamuju was one of the largest sources of economic commodities (especially copra) in South Sulawesi during the DI/TII period. This reality was then utilized by DI/TII by making Mamuju a strategic area within the economic network. The formation of Contact Post I in Mamuju is the first step in organizing an economic network. After that, efforts to fully control natural product commodities were carried out by making monopolistic economic rules. Mastery of economic results through rules that are made and then channeled by forming a Commercial Network. Through trade networks, commodity results were bartered for weapons and made Mamuju a massivearms smuggling area. Other results of bartering are luxury goods and other logistical needs. The DI/TII economic network began to weaken as patrols and military operations increased by the government and the TNI. The surrender of the TII troops through the "Call of the State", and the Indonesia-Malaysia confrontation were the climax of the cessation of the DI/TII economic network in South Sulawesi.

Keywords: Economic, DI/TII, Mamuju

Abstrak

Pokok bahasan penelitian ini ialah jaringan ekonomi DI/TII di Mamuju, 1953-1965. Metode olah data menggunakan metode sejarah; heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber datanya berupa wawancara terhadap informan pelaku dan saksi sejarah (sumber lisan), serta arsip, dokumen dan buku-buku yang relevan (sumber tertulis). Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa Mamuju merupakan salah satu sumber penghasil terbesar komoditas ekonomi (khususnya kopra) di Sulawesi Selatan pada masa DI/TII. Realitas ini kemudian dimanfaatkan DI/TII dengan menjadikan Mamuju sebagai kawasan strategis dalam jaringan ekonomi. Pembentukan Contact Post I di Mamuju adalah langkah awal organisasi jaringan ekonomi. Setelahnya, upaya kontrol penuh atas komoditas hasil alam dilakukan dengan membuat Aturan Ekonomi monopolistik. Penguasaan hasil-hasil ekonomi melalui aturan yang dibuat lalu disalurkan dengan membentuk Jaringan Niaga. Melalui jaringan niaga, hasil-hasil komoditas dibarter dengan senjata dan menjadikan Mamuju sebagai kawasan penyelundupan senjata yang masif. Hasil barteran lainnya ialah barang-barang mewah dan kebutuhan logistik lainnya. Jaringan ekonomi DI/TII mulai melemah seiring peningkatan patroli dan operasi militer yang dilakukan pemerintah bersama TNI. Penyerahan diri pasukan TII melalui "Panggilan Negara", dan konfrontasi Indonesia – Malaysia adalah klimaks berhentinya jaringan ekonomi DI/TII di Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Ekonomi, DI/TII, Mamuju.

*Coresponding author
Submit: May 2023 Revised: May 2023 Accepted: June 2023 Published: June 2023

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى وصف الشبكة الشبكة الاقتصادية لدار الإسلام / الجيش الإسلامي الإندونيسي (DI/TII) في ماموجو عام 1953-1965باستخدام المنهج التاريخي. وأمّا المصادر التاريخية المستخدمة هي الوثائق التاريخية و الوثائق الشفوية من نتيجة المقابلة مع الأصحاب التاريخية. ونتائج الدراسة هي أنّ ماموجو هي المنتج الرئيسي لجوز الهند حتى أصبحت ماموجو مركزا إقتصاديا لدار الإسلام / الجيش الإسلامي الإندونيسي (DI/TII) تحت مراقبة Contact Post I . احتكر عضو دار الإسلام / الجيش الإسلامي الإندونيسي (DI/TII) تجارة جوز الهند. تمت مقايضة جوز الهند بالأسلحة. أصبح ماموجو منطقة ضخمة لتهريب الأسلحة. وأما إنتاج المقايضة الأخرى هي الكماليات و التموين. ضعفت هذه الشبكة بسبب قيام الجيش الوطني الإندونيسي بترقية الجولة والعملية العسكرية. أصبحت استقالة الجيش الإسلامي الإندونيسي من خلال نداء الدولة و المواجهة بين إندونيسيا و ماليزيا ذورة في توقف الشبكة الاقتصادية لدار الإسلام / الجيش الإسلامي الإندونيسي (DI/TII) في سولاوسي الجنوبية.

الكلمات المفاتيح : ماموجو، جوز الهند، الشبكة الاقتصادية، دار الإسلام / الجيش الإسلامي الإندونيسي، الجيش الوطني الإندونيسي

Pendahuluan

Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan dideklarasikan oleh Qahhar Mudzakkar pada 7 Agustus 1953 yang bertahan selama 12 tahun (1953-1965). Gerakan ini tidak hanya di bidang politik dan militer, tetapi juga ekonomi. Ekonomi menjadi hal vital dalam kehidupan masyarakat. Negara, komunitas, hingga individu membutuhkan ekonomi untuk menjaga kelangsungan kehidupan.

Cakupan wilayah DI/TII cepat merambat ke berbagai jazirah Sulawesi Selatan, termasuk ke Mandar. Deklarasi resmi DI/TII di Mandar pada 7 November 1953 yang dilakukan di Distrik Pumbedjagi Kewedanan Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar). Selain faktor geografis dan sosial-politik, faktor ekonomi adalah salah satu alasan utama DI/TII melebarkan sayap hingga ke Mandar terutama daerah Mamuju. Setelah membentuk struktur militer, DI/TII membentuk struktur ekonomi dan memilih Mamuju sebagai kawasan ekonomi strategis dengan mendirikan Contact Post (Kongsi Dagang). Mengapa Mamuju dipilih sebagai basis ekonomi dan bagaimana bentuk jaringannya? Pertanyaan ini coba dijawab dalam artikel ini.

Ada empat literatur yang relevan studi ini. Pertama, "Aktifitas DI/TII dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Mamuju Tahun 1953-1965" karya Aco Fikram S,[1] mengulas tentang masifnya aktivitas DI/TII dari berbagai aspek, termasuk ekonomi. *Kedua*, tulisan Abd. Rahman Hamid, "Jaringan Maritim Mandar: Studi tentang Pelabuhan Kembar Pambauwang dan Majene di Selat Makassar 1900-1980"[2]. Karya ini banyak membahas keterlibatan DI/TII dalam jaringan ekonomi maritim di Mandar secara umum. *Ketiga*, karya Wilman Darsono Lumangino, "Smokol di Pantai Barat Sulawesi Tengah, Saling-Silang Ekonomi Maritim dan Politik di Masa Transisi, 1947-1967",[3] yang mengulas aktifitas penyelundupan dari aspek ekonomi maritim di pantai barat Sulawesi Tengah. *Keempat*, tulisan Ahmad Subair, "Jaringan Perdagangan Senjata pada Masa Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan Tahun 1950-1965,"[4] menemukan bahwa eksistensi gerakan ini tak lepas dari distribusi dan suplai senjata dari berbagai pihak yang bekerja sama dengan DI/TII. Empat tulisan ini masih bersifat umum. Belum ada kajian yang spesifik mengenai jaringan ekonomi DI/TII di Mamuju. Padahal, sepertiga sumber ekonomi DI/TII Sulawesi

---

[1]Aco Fikram S, *Aktivitas DI/TII dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Mamuju Tahun 1953-1965*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

[2]Abd. Rahman Hamid, *Jaringan Maritim Mandar: Studi tentang Pelabuhan "Kembar" Pambauwang dan Majene di Selat Makassar 1900 - 1980*, (Yogyakarta: Ombak, 2021).

[3]Wilman Darsono Lumangino, *Smokol di Pantai Barat Sulawesi Tengah*, *Saling-Silang Ekonomi Maritim dan Politik di Masa Transisi*, *1947-1967*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).

[4]Ahmad Subair, *Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan DI/TII 1950-1965*, Tesis, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018).

Selatan dari hasil alam Mamuju. Daerah ini bahkan menjadi wilayah *de facto* terluas DI/TII di Kabupaten Mandar.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap kerja yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber sejarah yang digunakan berupa tulisan dan lisan. Khasanah arsip yang digunakan antara lain *Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960*, *Arsip Koleksi Pribadi Saleh Lahade 1937-1973*, *Arsip Mamuju 1963-1995*. Kemudian sumber lisan diperoleh lewat wawancara dengan para pelaku dan saksi peristiwa sebanyak lima orang sebagai berikut:

Tabel 1 Pelaku dan saksi peristiwa DI/TII di Mamuju

No	Nama	Usia (tahun)	Keterangan
1	Abd. Madjid	86	eks TII KDB 28 di Mamuju
2	Aras	71	masyarakat sipil/saksi hidup pada masa DI/TII
3	Iming Wijaya	69	masyarakat sipil/saksi hidup pada masa DI/TII
4	Muh. Syukni E	82	eks TII dan pejuang FPRTM
5	Muh.Jamal Bandi	87	eks Komandan Peleton IV DI/TII
6	Uping	84	masyarakat sipil/saksi hidup pada masa DI/TII

Tahap kedua, kritik sumber, menentukan autentikasi dan kredibilitas sumber sejarah. Dalam tahap ini, arsip dan dokumen serta keterangan langsung dari informan yang dikumpulkan merupakan sumber primer yang autentik dan kredibel, karena dibuat dan disaksikan oleh pelaku dan saksi. Tahap ketiga ialah interpretasi atau penafsiran sejarah, yang sering disebut juga disebut analisis sejarah dengan melakukan analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Tahap terakhir ialah historiografi. Pada tahap ini penulis mengadakan serialisasi dalam cerita sejarah secara kronologi, kausalitas, dan imajinatif.[5]

Pembahasan

1. Pembentukan Contact Post

Secara politis ada dua kedudukan Mamuju dalam struktur DI/TII, yakni militer dan ekonomi. Dalam struktur militer setingkat Kabupaten Mandar, Mamuju bersama dengan Majene dan Polewali Mamasa merupakan bagian dari Resimen III yang dipimpin oleh M.T. Rachmat. Struktur ini dibentuk pada November 1953 di Pumbedjagi Kewedanaan Polewali Mamasa.[6] Sedang setingkat Kewedanaan Mamuju, terdapat KDB (Komandemen Batalion) 28 yang dipimpin oleh Kapten Mansur.[7]

Dalam struktur ekonomi, Mamuju dijadikan Contact Post I (CP I) dari tiga Contact Post yang dibentuk oleh DI/TII. Dua Contact Post lain di Bulukumba sebagai Contact Post II (CP II) dan Lampesue (Luwu Timur) sebagai Contact Post III (CP III). Sejauh ini tidak ditemukan sumber yang menjelaskan mengenai waktu persis pembentukan CP. Tetapi dapat disimpulkan bahwa

[5]Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 51-52.

[6]Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, No. 189.

[7] Wawancara dengan Abdul Madjid di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.

pendirian CP tidak lama setelah pembentukan struktur militer, dengan alasan akomodasi logistik adalah roda utama organisasi gerakan DI/TII. Tugas dan fungsi CP ialah di bidang perniagaan.[8] Hal ini dikuatkan oleh Abdul Madjid[9] bahwa:

> "Hasilnya di sini (Mamuju) kopra dengan rotan. Jadi ada pedagang dari DI/TII namanya Kongsi Dagang (CP). Kongsi dagang yang terkenal pada saat itu, orangnya juga kaya, namanya Haji Mamat, tinggal di Batu Karampuang (sekarang dekat Salubiro, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah).

Markas CP I berada di antara Karossa dan Sarudu, dan dikomandoi oleh A.G. Sakti, asal Palopo. Pasukan (pegawainya) pun didominasi orang Palopo. Abdul Majid kemudian mengatakan bahwa "kalau A.G. Sakti itu di Nunu (Kec. Sarudu), Pasangkayu. Dia itu orang Palopo, pangkatnya mayor. Mereka (pasukan Palopo) itu mengejar hasil (berupa barang dan lainnya)."[10] Hal ini ditegaskan pula Muh. Jamal Bandi,[11] bahwa "CP I itu dominan diisi orang Palopo, komandannya ialah A.G. Sakti. CP dibantu *Momoc Merah* (salah satu batalyon DI/TII) yang berada di Sulawesi Tengah. Pasukan Momoc Merah juga didominasi oleh orang Palopo. CP I dan Momok Merah termasuk orang-orang Palopo.[12]

Ada 3 faktor dipilihnya Mamuju sebagai lokasi CP I yaitu faktor geografis, ekonomi, dan keamanan. Terkait faktor geografis, luas wilayah Kabupaten Mandar 2/3-nya merupakan wilayah Mamuju. Pada bagian utara, Mamuju berbatasan dengan Donggala (Sulawesi Tengah) yang juga salah satu wilayah penghasil kopra terbesar di Sulawesi. Di bagian barat, terdapat Selat Makassar (jalur perdagangan) yang terhubung ke kota pelabuhan dan pusat perdagangan, Balikpapan, Bontang, hingga Tawau. Jika dilihat pada peta, jarak antara Mamuju dengan ketiga kota tersebut lebih dekat dibanding Majene dan Polewali. Di bagian timur, posisi Mamuju juga lebih dekat ke Palopo melalui jalur Kalumpang ke Seko.[13] Sedang pada bagian selatan dan barat daya terdapat Distrik Tappalang, salah satu penghasil kopra terbesar di Mamuju.

Dari faktor ekonomi*,* Mamuju memiliki sumber daya alam yang potensial, utamanya dari sektor agraris seperti rotan, damar, dan kelapa (yang kemudian diolah menjadi kopra). Komoditas terakhir merupakan komoditas dominan di daerah ini. Berikut tabelnya:

Tabel 2 Laporan Hasil Perdagangan Bulanan di Mamuju 1951

Lokasi	Hasil Produsen Tiap Bulan			Jumlah Harga
	Kopra (ton)	Rotan (ton)	Damar (ton)	
1. Tappalang	150	-	5	174.000
2. Mamuju	200	30	-	253.000
3. Kalukku	40	60	-	74.000
4. Sampaga	40	100	15	121.000

[8] Ahmad Subair, *Jaringan Perdagangan Senjata*…h. 67.
[9] Wawancara di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.
[10] Wawancara dengan Abdul Madjid di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.
[11] Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi di Tadui Mamuju, 31 Agustus 2018.
[12] Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi Tadui Mamuju, 31 Agustus 2018.
[13] Wawancara dengan Abdul Madjid di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.

5. Budong-Budong	70	80	5	144.000
6. Karossa	70	50	10	120.000
7. Bambaloka	50	30	-	70.000
8. Lariang	100	60	15	167.000
9. Pasangkayu	100	30	-	125.000
Jumlah	820	440	50	Rp. 1.230.000

Sumber: Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 487

Dominasi kopra juga ditegaskan oleh Mattulada dan Abd. Rachman Situdju, sebagai wakil pemerintah pusat (Makassar) dalam lawatan investigasinya ke Mamuju pada tahun 1951 mengenai pembantaian etnis Tionghoa di Mandar Utara (Mamuju), bahwa kopra adalah hasil utama masyarakat disamping sebagai nelayan.[14]

Terakhir, faktor kemanan. Faktor ini sangat vital, sebab kelancaran dan kemudahan jaringan ekonomi DI/TII tergantung pada faktor aman atau tidaknya kawasan yang dipilih. Selama masa pendudukan DI/TII di Mandar, Mamuju merupakan daerah terakhir dan terlama dikuasai. Oleh bentang alam yang sangat luas, membuat pemerintah bersama TNI sulit mengontrol daerah ini seluruhnya. Dari tahun 1953 hingga 1957, terdapat hanya ada satu hingga dua kompi yang berada di Mamuju kota secara bergantian. Kompi ini jugalah yang melakukan patroli ke Sampaga, Budong-Budong dan Pasangkayu, itupun sifatnya temporal (jika TNI kembali ke Mamuju kota, dengan cepat DI/TII kembali menguasai wilayah yang ditinggalkan TNI).[15]

Kondisi ini diperparah dengan medan dan akses darat dari Majene (sebagai ibukota kabupaten) yang sulit ditembus. Nyaris hanya akses laut yang dapat digunakan, itupun TNI juga mengeluhkan keterbatasan sarana patroli seperti *motorboot*. Realitas ini jugalah sehingga Mamuju dengan mudah dalam kendali DI/TII, bahkan Mamuju dijadikan pelarian jika pasukan DI/TII dari Majene, Polewali, Enrekang, Toraja dan daerah perbatasan lainnya dipaksa mundur oleh TNI.[16] Tiga faktor ini oleh DI/TII memilih Mamuju sebagai basis CP I mereka.

2. Aturan Ekonomi

Fakta potensial ekonomi Mamuju secara tidak langsung menjadi keuntungan besar bagi DI/TII. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh CP dengan membuat aturan ekonomi dalam mengontrol seluruh aktifitas niaga dan hasil panen masyarakat. Ada tiga aturan ekonomi CP yaitu: aturan dagang satu pintu, potongan pajak 10%, dan pungutan sumbangan.

Setelah menguasai wilayah-wilayah strategis, CP sebagai kongsi dagang menerapkan aturan ekonomi agar seluruh hasil komoditas masyarakat dijual kepada CP. Hal ini dikemukakan oleh seorang pelaku sejarah, bahwa "Kita tidak bisa menjual kopra selain di kongsi dagang, karena akan ditangkap jika tidak (menjual ke mereka)."[17] Hal senada dikatakan juga oleh Sangkung[18] bahwa:

[14] Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 487.
[15] Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233.
[16] Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, No.189.
[17] Wawancara dengan Abdul Madjid di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.
[18] Wawancara di Lebani Mamuju. 6 Juni 2021.

"Di sini dulu banyak kopra dan kopi, dan kita jual di pasar Senin (Lebani). Sebelum kongsi dagang (CP) ada, yang menjadi penampung (pembeli) kopra itu Daeng Masompa (warga sipil). Setelah DI/TII masuk, mereka lalu memerintah kepala kampung di sini untuk memungut hasil. Awalnya tidak ada gudang penyimpanan kopra di Lebani, tapi setelah kongsi dagang hadir, maka dibangunkanlah gudang. Kopra-kopra tersebut kemudian dijual ke Makassar, Balikpapan dan Surabaya, dan yang muat itu kopra ialah perahu (jenis) *baqgoq*."

Kendati kebijakan ini terkesan monopolistik, tetapi CP tetap memakai asas resiprositas, bukan mengambil secara paksa atau cuma-cuma. Hal ini dinyatakan oleh Muh. Jamal Bandi,[19] bahwa "kopra kita beli ke masyarakat melalui kongsi dagang, jadi bukan dirampas". Menurut Abdul Madjid,[20] bahwa "DI/TII tidak mengambil sepihak kopra masyarakat, mereka juga beli, tapi mereka juga yang pasang harga."

Bermitra dengan CP lebih untung yakni 20% ketimbang dijual ke Dana Usaha Petani Kopra (DUPKO) sebagai koperasi Yayasan Kopra milik pemerintah. Sebagai contoh, harga kopra perkuintal yang dibeli oleh CP sebesar Rp.120, sedangkan oleh DUPKO ialah Rp.100. Keuntungan lain juga dari segi efisiensi. CP menerapkan sistem jemput barang, sedangkan DUPKO sistem tunggu yang mana masyarakatlah yang membawa langsung ke gudang DUPKO.[21]

Di sisi lain, terdengar kabar bahwa di beberapa kampung-kampung, CP melakukan pembagian matematis lahan kelapa atau kopra masyarakat yakni 50% untuk petani pemilik kopra dan 50% diambil oleh CP. Tetapi kopra dan hasil bumi lainnya milik para pegawai pemerintahan dan masyarakat yang ditinggal mengungsi, seluruhnya menjadi milik DI/TII.[22]

Aturan kedua ialah potongan pajak 10%. Pungutan ini sifatnya wajib dan diberlakukan kepada semua aktifitas dagang.

"Di DI/TII itu jika masyarakat menjual barang, maka ada potongannya (pajak) 10%. Pokoknya apa saja yang mujual (yang kamu jual), harus kamu bayar 10%. Begitulah juga dia (mereka) aturannya.[23]

Potongan ini juga berlaku dalam setiap hasil panen masyarakat.

"Jadi beras itu kita dapat juga separuhnya dari petani (masyarakat). Tiap-tiap kampung itu ada lumbung padi yang sudah tersedia, dari hasil panen masyarakat itu kita ambil 10% untuk dimasukan ke lumbung sebagai pajak".[24]

Mengenai ini juga diterangkan oleh Uping;

"Jadi awal-awal mereka (Gurilla) datang itu menemui kepala kampung, namanya Talabarang. Setiap desa itu mengeluarkan zakat untuk dimasukan ke lumbung."[25]

Potongan hasil panen dimasukan ke lumbung pangan DI/TII sebagai stok pangan mereka. Distribusi pangan (beras dan lainnya) DI/TII Mamuju berasal dari jaringan pelabuhan di Parepare, Polewali, dan Majene.[26] Kendati demikian, kebijakan ini bukan satu-satunya sumber pangan DI/TII. Mereka juga melakukan kegiatan pertanian dalam wilayah de facto mereka. "Untuk kebutuhan makan, kami dulu juga berkebun. Sawah pertanian DI/TII di Salubejau itu

[19] Wawancara di Tadui Mamuju, 31 Agustus 2018.
[20] Wawancara di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.
[21] Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, No.272.
[22] Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233.
[23] Wawancara dengan Abdul Madjid di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.
[24] Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi di Tadui Mamuju, 31 Agustus 2018.
[25] Wawancara dengan Uping di Kalukku Mamuju, 7 Februari 2021.
[26] Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233.

dulu sangat luas, kami bekerja sama dengan masyarakat" kata Abd. Madjid.[27] Berikut juga keterangan dari Muh. Jamal Bandi[28] bahwa:

> "Masalah makanan, kami dulu makan ala kadarnya juga, kadang sagu kadang ubi dan lain-lain, dan masyarakat juga mendukung kami (dengan menyiapkan beberapa makanan). Masyarakat yang tinggal di wilayah de facto DI/TII mendukung kami, dan memang mau tidak mau mereka akan mendukung karena masuk de facto DI/TII."

Aturan terakhir ialah pungutan sumbangan. Jika DI/TII hendak melaksanakan pasar malam atau hiburan lainnya, ongkos acaranya dipungut dari sumbangan masyarakat. Hal ini terjadi pada 4-6 Juli 1956 di Karanamu, Galung Tappalang. Gerilyawan TII yang dikomandoi oleh Sunusi (asal kampung Tande Majene), mewajibkan kepada setiap laki-laki dewasa membayar Rp. 7.50 dan 2 liter beras. Sejalan dengan ini, gerilyawan juga telah menaksir pungutan kepada tiap-tiap rakyat di Tappalang yakni sebesar Rp. 5 perorang.[29] Kejadian ini dialami oleh Uping,[30] warga asal kampung Botteng, distrik Tappalang, bahwa "kalau mereka datang, mereka itu meminta sumbangan jaminan. Mereka minta macam-macam."

Penguasaan penuh pada sektor ekonomi tidak hanya dilakukan melalui tiga kebijakan di atas, tetapi juga melalui perompakan (bajak laut). Hal ini sering terjadi di Tanjung Rangas (Kewedanaan Mamuju). "Dulu saat kita punya barang (dari Makassar) itu sangat jarang dan susah sampai di darat, pasti cuman sampai di Tanjung Rangas, karena pasti dirampok DI/TII", kata Iming Wijaya.[31] Aktifitas perompak atau bajak laut sebelum masa DI/TII sudah marak terjadi di sepanjang selat Makassar. Terdapat kelompok seperti TKR Daeng Toba, TKR Usman Balo, Kucing Hitam, Badan Persiapan Buaya Indonesia (BPBI) yang dipimpin Talaka, dan lainnya.[32]

3. Jaringan Niaga

Jaringan niaga DI/TII di Mamuju dibagi dua yaitu jaringan luar negeri dan jaringan dalam negeri. Kedua jaringan ini bermuara pada penyediaan senjata dan kebutuhan logistik lainnya.

a. Jaringan Niaga Luar Negeri

Pada masa DI/TII, kopra menjadi primadona pasar internasional. Olehnya, komoditas ini menjadi sumber utama ekonomi DI/TII di Mamuju.[33] Menurut laporan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Mamuju tahun 1953, sekira 300.000 pohon kelapa di Tappalang hingga Kalukku dapat dikuasai oleh CP.[34] Pada tahun 1954, Mayor A.F. Langkai (Komandan KDM Makassar), memimpin patroli di sepanjang Selat Makassar (Makassar – Donggala).[35] Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat aktifitas penyelundupan masif DI/TII dari Pamboang hingga Mamuju (utamanya di Lumu, Budong-Budong, Karossa, Lariang dan Pasangkayu).[36] Dari pedalaman Sampaga, terdapat rotan dan damar sebagai hasil utama. Tetapi setelah dikuasai Di/TII, tidak

[27] Wawancara di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.

[28] Wawancara di Tadui Mamuju, 31 Agustus 2018.

[29] Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233.

[30] Wawancara di Kalukku Mamuju, 7 Februari 2021.

[31] Wawancara di Mamuju, 16 April 2021.

[32] Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233.

[33] Rasyid Asba, *Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

[34] Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 272.

[35] Abd. Rahman Hamid, *Jaringan Maritim Mandar…,* h. 293.

[36] Wawancara dengan Abdul Madjid (86 tahun) di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.

ada lagi hasil-hasil bumi yang masuk ke laporan pemerintah.[37] Hasil ini kemudian dibawa ke Donggala lalu diteruskan ke Tawau dan Filipina.

Pada tahun 1955-1956, DI/TII hampir seluruhnya menguasai hasil kopra di distrik Tappalang, (mulai dari Galung, Dungkait, Lebani, Tapandullu, Simboro) dan Kalukku. Tercatat sebanyak 300 ton hasil kopra sebulan yang masuk ke kas pemerintah, merosot menjadi 30 ton selama dikuasai oleh DI/TII. Di tahun yang sama, hasil kopra (seluruh kewedanaan Mamuju) dalam sebulan mencapai 1200 ton. Dari hasil tersebut, hanya 10% yang masuk ke dalam gudang DUPKO Yajasan Kopra Mamuju, sedang 90%-nya dikuasai DI/TII.[38]

Tabel 3 Pembelian Yayasan Kopra tahun 1954

Kabupaten/Kota	Jumlah
1. Makassar	329
2. Bonthain (Bantaeng)	5. 575
3. Pare-Pare	283
4. Luwu	5.257
5. Bone	480
6. Mandar	9.878

Sumber: Arsip Saleh Lahade (1950-1957) No. 272

Menurut sumber KPN Mamuju, kopra tersebut diselundupkan ke Tawau dan daerah lainnya.[39] Selain Tawau, jaringan dagang DI/TII juga terkoneksi ke Singapura, Filipina dan Hongkong. Kopra tersebut mayoritas dibarter dengan senjata, selebihnya dikonversi ke uang (rupiah), kain sutra dan barang mewah lainnya.[40] Salah satu eks TII dari Donggala mengisahkan bahwa:

> "Sejak saya bergabung dengan DI/TII (1955-1963), kalau tidak salah ingat ada tiga puluh kali berangkat ke Tawau, Lahat Datu dua kali, Jolo empat kali, dan Hongkong empat kali untuk beli senjata dan pelurunya. Ada juga yang dikirim ke (Sulawesi) Selatan."[41]

Hal yang senada juga dikisahkan oleh 2 eks DI/TII Mamuju:

> "Itu senjata dulu, kan kita kirim juga kopra dan hasil lainnya itu keluar masuk, mereka kirim juga ke mari (Mamuju) itu senjata dan barang berupa kain dan macam-macam di (pantai) Silaya. Kopra dulunya itu sangat banyak karena penghasilan utama (masyarakat) pada saat itu kopra."[42]

> "Yang antar itu kopra TII, mereka kawal sampai ke Tawau. Jadi mereka itu kembali bawa barang (setelah datang dari Tawau). Mereka tidak bagi-bagi ke masyarakat, tetapi langsung dibawa ke Seko, karena itu barang punyanya orang Bugis."[43]

Bandar niaga di Tawau, Singapura, dan Filipina terbuka bagi semua pedagang. Karena itu tidak ada sebab khusus bagi DI/TII membuka jaringan dagang di ketiga kota ini. Pelabuhan Tawau dibuka tahun 1950 oleh pemerintah Inggris sebagai salah satu pusat perdagangan

[37] Abd. Rahman Hamid, *Jaringan Maritim Mandar…,* h. 297.
[38] Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, No. 272.
[39] Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233.
[40] Ahmad Subair, *Jaringan Perdagangan Senjata…* h. 90.
[41] Wilman DL, *Smokol Di Pantai Barat…*h. 120.
[42] Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (87 tahun) di Tadui Mamuju, 31 Agustus 2018.
[43] Wawancara dengan Abdul Madjid (86 tahun) di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.

internasional khususnya kopra.[44] 90% kopra tujuan Tawau ditukarkan dengan senjata dan sisanya ditukarkan dengan kain dan barang-barang mewah lainnya.[45] Selain dikenal sebagai pusat transaksi niaga kopra di kawasan Asia Tenggara, pasaran kopra di Tawau juga relatif mahal, yakni 24 dollar per pikul. Selain itu, baik kualitas kopra rendah dan tinggi, semua diterima.[46] Keberadaan orang-orang Sulawesi Selatan (khususnya Bugis) di Tawau sebelum tahun 1950 juga menjadi faktor terbentuknya jaringan ekonomi DI/TII di Tawau.[47]

Pelabuhan Singapura sudah ada sejak abad XIX.[48] Di Singapura, penyelundupan dilakukan sejak tahun 1950. Menurut Bahar Mattalioe, terdapat hubungan antara pimpinan DI/TII Sulawesi Selatan dengan seorang oknum yang mengatasnamakan dirinya Menteri Luar Negeri DI di Singapura. Sedang dengan Filipina, DI/TII menjalin hubungan dengan para nelayan dari Kepulauan Sulu. Para pedagang di Mindanao lebih suka kopra dari Sulawesi karena mendatangkan banyak keuntungan.[49]

b. Jaringan Niaga Dalam Negeri

Pada jaringan ini, daerah tujuan selundupan diantaranya Kalimantan Selatan dan Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Probolinggo dan Pasuruan). Dua daerah ini juga sering menjadi tempat transit menuju Singapura.[50]

> “Jadi kopra itu biasa kita (kami) tukar dengan senjata. Kita beli dulu kopra masyarakat kemudian dibawa ke Kalimantan dan Jawa. Adapun pelabuhan yang kami tempati berangkat itu di Kalukku.”[51]

Dalam satu surat rahasia disebutkan sejak Juli 1957, terdapat ratusan perahu penyelundup dikerahkan gerilyawan (DI/TII) mengangkut kopra pada pelabuhan-pelabuhan di Kewedanaan Majene, Mamuju dan Tolitoli. Pada tahun 1959, di daerah Pasangkayu, produksi kopra dari 150 ton setiap bulannya berkurang menjadi 50 ton. Kopra dari daerah ini diselundupkan melalui Donggala, ke Kalimantan Selatan, Gresik, Kali Mas (Surabaya), juga ke Singapura.[52] Distribusi kopra dari Mamuju ke Donggala dilakukan CP bekerjasama dengan batalyon *Momoc Merah* yang berada Sulawesi Tengah. Daerah-daerah (luar dan dalam negeri) ini memang langganan para eksportir kopra.[53] Kopra dan hasil lainnya dibawa langsung melalui kapal-kapal yang mereka beli atau menyewa dari orang Mandar dan Bugis. Jenis perahu seperti *pinishi*, *nade* atau *lambo* dan *bago* (baca: *baqgoq*), merupakan perahu yang sering digunakan dalam melakukan penyelundupan.[54] “Kapal mereka itu kapal kayu, bukan kapal besi.”[55]

Jaringan niaga dalam negeri DI/TII juga berasal dari para oknum TNI lokal. Terdapat Bn. 716 pimpinan Andi Sose yang menguasai Parepare dan Sidrap, dan Bn. 710 pimpinan Andi Selle yang menguasai Mandar. Nama terakhir menjadi mitra niaga paling mesra dengan DI/TII. Keterlibatan oknum TNI dalam pasar gelap bukan tanpa alasan. Dengan situasi ekonomi negara

---

[44] Wilman DL, *Smokol Di Pantai Barat*…h. 87.

[45] Ahmad Subair, *Jaringan Perdagangan Senjata…,* h. 90.

[46] Abd. Rahman Hamid, *Jaringan Maritim Mandar*…h. 298-299.

[47] Suwarsono, *Kabupaten Perbatasan Nunukan: Beberapa Karasteristik*, h, 142. Dikutip dalam: Wilman DL, *Smokol Di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silang Ekonomi Maritim dan Politik di Masa Transisi, 1947-1967*, h. 89-90.

[48] Ahmad Subair, *Jaringan Perdagangan Senjata…,* h. 90.

[49] Abd. Rahman Hamid, *Jaringan Maritim Mandar*…h. 295, 301.

[50] Abd. Rahman Hamid, *Jaringan Maritim Mandar…,* h. 297.

[51] Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (87 tahun) di Tadui Mamuju, 31 Agustus 2018.

[52] Abd. Rahman Hamid, *Jaringan Maritim Mandar*…h, h. 297, 308.

[53] Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 628.

[54] Wilman DL, *Smokol di Pantai Barat…*, h. 70.

[55] Wawancara dengan Abd. Madjid (86 tahun) di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.

yang belum pulih pasca kemerdekaan, negara belum dapat menjamin gaji TNI serta minimnya alokasi dana baik untuk pemeliharaan maupun untuk operasi. Olehnya, bergabung dalam bisnis kopra merupakan alternatif dan sebuah peluang besar. Sejatinya, Selle ditugaskan untuk menumpas gerakan DI/TII di Mandar, tetapi di lapangan berkata lain, Selle justru secara rahasia menjalin relasi bisnis gelap dengan Qahhar.[56] Dalam perkembangannya, terbentuk mitra dagang keduanya. Selle lalu membentuk Tjadangan Bantuan Operasi (TBO) khusus untuk menangani ekonomi. TBO inilah yang bekerjasama dengan CP dalam transaksi niaga. Mitra rahasia ini mudah saja terjalin mengingat Andi Selle merupakan bekas *partner* Qahhar sewaktu masih di Corps Tjadangan Nasional (CTN).[57]

Pelabuhan Pare-Pare dan Mandar (Polewali) merupakan dua pelabuhan yang aktif digunakan Andi Selle dan Andi Sose dalam penyelundupan dan barter kopra dengan DI/TII. Kedua daerah (pelabuhan) ini sengaja dihindarkan dari operasi militer DI/TII Qahhar, karena merupakan sumber senjata dan persediaan lainnya. Selain itu, Parepare juga merupakan Dari pelabuhan tersebut, hubungan penyelundupan dengan Kalimantan, Tawau, dengan Singapura mudah diadakan. Bahkan tersebar desas-desus bahwa Andi Rifai, setelah diangkat menjadi komandan RI-23 di Parepare tahun 1957, tidak menentang penjualan senjata kepada Qahhar.[58]

Strategi DI/TII menguasai komoditas daerah pedalaman dan pelabuhan-pelabuhan di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, seperti Pelabuhan Mandar (Mamuju), Belopa, Bajoe, Balangnipa dan Bulukumba, membuat mereka sepenuhnya menguasai perekonomian yang berimplikasi pada mudahnya mendapatkan senjata-senjata yang mereka inginkan lewat kongkalikong dengan asing dan TNI.[59] Sedangkan bagi 710, hasil barteran kopra tersebut membuat mereka semakin makmur.[60]

Aktifitas niaga DI/TII (barter kopra – senjata) juga menjadikan Mamuju sebagai wilayah penyelundupan senjata. Umumnya di sepanjang pesisir Mandar merupakan kantong-kantong wilayah penyelundupan senjata DI/TII. Tetapi intensitas penyelundupan berada di Mamuju (utamanya Silaya, distrik Karossa) sebagai wilayah *de facto* terluas di Kabupaten Mandar.

> "Itu di Silaya dulu banyak senjata. Saking banyaknya itu senjata, biar 3 biji senjata per orang. Bukan ratusan itu senjata, tetapi ribuan. Kalau rumah saya itu diisi bren, tidak muat, saking banyaknya. Jadi, saya lihat betul itu senjata, bahkan saya yang ikut menyelam ambil itu senjata di bawah air. Jadi itu senjata di lapisan luarnya ada kayu, setelah dibuka, dilapisi lagi dengan aluminium dan dilapisi lagi dengan plastik putih tebal jadi tidak bisa masuk air. Senjatanya masih bagus, masih baru bahkan, tidak berkarat. Jenis senjatanya itu LE (?) dan bren banyak. Itu peluru banyaknya! Memang itu senjata siap perang, satu tempat itu peluru isinya seratus, sisa diikat saja di pinggang ".[61]

Keterangan ini juga dikuatkan oleh Muh. Jamal Bandi:[62]

> "Untuk persenjataan, macam-macam kita dapat, ada yang dibeli (dibarter dengan kopra), ada juga hasil rampasan perang, kalau yang dibeli itu dari Malaysia (Tawau), dan yang pergi membeli itu orang-orang dari kita juga. Tempat-tempat atau pelabuhan yang

[56] Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233.

[57] Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII* (Jakarta: Grafiti, 1989), h. 239.

[58] Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar…,* h. 207.

[59] A.Rasyid Asba, *Kopra Makassar…*h. 229.

[60] Ahmad M. Sewang, *Autobiografi Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M. A: Di Mana Ada Kemauan, Di Sana Ada Jalan*, (Makassar: Syahadah Creative Media, 2017), h. 37.

[61] Wawancara dengan Abd. Madjid (86 tahun) di Karossa Mamuju, 10 Juni 2021.

[62] Wawancara di Tadui Mamuju, 31 Agustus 2018.

kita tempati itu ada beberapa, salahsatunya di pelabuhan Silaya itu kan banyak dulu senjata masuk."

Sedang di beberapa pelabuhan seperti di Kalukku, Sampaga, dan Budong-Budong, penyelundupan tidak seaktif dan semasif di Silaya. "Beberapa tempat pengiriman senjata itu ada di Kalukku, ada di Sampaga, ada juga di Budong-Budong, tapi tidak seberapa, hanya sekitaran 3 sampai 5 pucuk", kata Muh.Jamal Bandi.[63]

Pada tahun 1959, jaringan ekonomi DI/TII di Mamuju mulai melemah seiring patroli dan operasi militer yang intens dilakukan TNI bersama pemerintah dan masyarakat. TNI juga membuat organisasi semi militer salahsatunya Front Pembebasan Rakyat Tertindas di Mandar (FPRTM) dan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR). Operasi ini perdampak pada banyaknya pasukan TII yang ikut "Panggialan Negara" termasuk komandan Resimen III, M.T. Rachmat.[64]

Menurut Muh. Syukni E, bahwa "Kalau pasukan dari Mandar itu ada M.T. Rahmat dan Bandru (yang masuk FPRTM), tapi setelah ada panggilan negara ya saya ikut ke Majene dan sama-sama kami berjuang. Sebenarnya MT. Rahmat ini DI/TII dulunya, tapi setelah ada Panggilan Negara makanya dia masuk TNI"[65] Saksi lain, Muh. Jamal Bandi,[66] mengatakan bahwa "DI/TII (mulai) kalah pada saat sudah ada istilahnya "Panggilan Negara". Soekarno sudah keluarkan surat yang menghimbau kepada DI/TII untuk keluar dari DI/TII dan (kembali) ke pangkuan ibu pertiwi, setelah itu kami semua masuk ke negara (keluar dari DI/TII), dan klimaksnya tahun 1960, (sebelumnya) tahun 1959 kita sudah keluar."

Dampaknya, jaringan ekonomi DI/TII di Mamuju nyaris berhenti total. Hal ini semakin diperparah dengan konfrontasi Malaysia – Indonesia pada tahun 196.[67] Terbunuhnya Qahhar pada operasi militer di Sulawesi Tenggara tahun 1965, merupakan akhir dari seluruh aktivitas DI/TII Sulawesi Selatan.

Kesimpulan

DI/TII Sulawesi Selatan adalah salah satu gerakan yang mempunyai pengaruh dan dampak besar di masyarakat. Dengan kekuatan massa dan militernya, gerakan ini mengakomodir hampir semua aspek kehidupan masyarakat, salah satunya aspek ekonomi. Pembentukan jaringan ekonomi di Mamuju adalah penegasan bahwa Mamuju memiliki hasil ekonomi yang melimpah (khusunya dalam bidang kelapa yang diolah menjadi kopra) sekaligus memiliki posisi strategis dalam jaringan ekonomi di pantai barat Sulawesi. Dalam perkembangannya, kekuatan DI/TII semakin menguat seiring kontrol dominan mereka atas Mamuju secara de facto. Sejatinya, jaringan ekonomi DI/TII di Mamuju tidak lain demi menjaga eksistensi dan stabilitas mereka selama melakukan perjuangan dan perlawanan. Dari penguasaan aspek ekonomi ini, kebutuhan mereka akan logistik pangan, barang, hingga persenjataan dengan mudah didapatkan. Kiranya penelitian ini sebagai bahan kajian awal dalam melakukan penelitian lanjutan yang terkait. Mengingat, kemungkinan besar penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam berbagai hal.

Daftar Acuan

Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233; *Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari Daerah Mandar".*

Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 487; *Surat tanggal 6 Agustus 1951 tentang aksi bajak laut di Lariang (Mandar Utara) yg mengadakan penculikan, pembunuhan dan perampokan terhadap pedagang-pedagang Tionghoa*.

[63] Wawancara di Tadui Mamuju, 31 Agustus 2018.
[64] Abd. Rahman Hamid, *Jaringan Maritim Mandar*.. h. 334.
[65] Wawancara dengan Muh. Syukni E (82 tahun) di Sampaga Mamuju, 9 Juni 2021.
[66] Wawancara di Tadui Mamuju, 31 Agustus 2018.
[67]Wilman DL, *Smokol Di Pantai Barat…,*h. 147-154.

Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 628; *Surat-surat masuk/keluar tahun 1956-1957 tentang masalah yang berhubungan dengan pengangkutan/penyelundupan kopra*.

Arsip Saleh Lahade, No. 272; *Berkas mengenai kegiatan perdagangan kopra/kelapa di daerah Territerium VII Indonesia Timur*.

Asba, Rasyid, *Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Fachriyadi, *Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Di Kawasan Teluk Bone 1953-1965*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

Fikram S, Aco, *Aktivitas DI/TII dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Mamuju 1953-1965*, (Makassar: UIN Alauddin, 2019).

Gonggong, Anhar, *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Jakarta: Grasindo, 1992.

Hamid, Abd Rahman & Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.

Hamid, Abd. Rahman, "Pelayaran Lintas Selat Makassar: Perkembangan Jaringan Maritim Mandar dalam Era Revolusi", *Abad Jurnal Sejarah* 2, No. 1, Juni 2018.

Hamid, Abd. Rahman, *Jaringan Maritim Mandar: Studi tentang Pelabuhan Kembar Pambauwang dan Majene di Selat Makassar 1900-1980*, (Yogyakarta: Ombak, 2021).

Hasanuddin, Dinamika Tata Niaga Kopra di Minahasa (1946-1958), *Patanjala* 10, No. 2, Juni 2018.

M. Sewang, Ahmad, *Autobiografi Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M. A: Di Mana Ada Kemauan, Di Sana Ada Jalan*, (CV. Syahadah Creative Media: Makassar, 2017)

Sillars Harvey, Barbara, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII*, (Jakarta: *Pustaka* Utama Grafiti, 1989).

Subair, Ahmad, *Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan DI/TII 1950-1965*, Tesis, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018).

Wilman DL, *Smokol Di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silanng Ekonomi Maritim Dan Politik Di Masa Transisi, 1947-1967*, Tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).